

## PERAN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LAHAT

Emelda Anisyah<sup>1</sup>, Muslimin Ritonga<sup>2</sup>

Email: [musliminritonga@radenfatah.ac.id](mailto:musliminritonga@radenfatah.ac.id)

<sup>1,2</sup>Universita Islam Negeri Raden Fatah Palembang

### ABSTRAK

Transparansi informasi publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan mengelola informasi secara terbuka melalui Daftar Informasi Publik (DIP). Dalam konteks pemerintahan daerah, peran unit komunikasi pemerintah, khususnya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, menjadi strategis dalam menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terhadap transparansi informasi publik di Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pengelolaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berperan penting dalam penyediaan, pengemasan, dan penyampaian informasi kebijakan serta aktivitas pimpinan daerah yang terintegrasi dalam sistem PPID dan tersusun dalam Daftar Informasi Publik berbasis digital. Namun demikian, pelaksanaan transparansi informasi publik belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala koordinasi antar organisasi perangkat daerah, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya pemanfaatan informasi oleh masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa transparansi informasi publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem dan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi pemerintahan dan komitmen kelembagaan. Optimalisasi peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkelanjutan di Kabupaten Lahat.

**Kata Kunci:** Transparansi Informasi Publik; Komunikasi Pimpinan; PPID; Pemerintahan Daerah.

### ABSTRACT

*Public information transparency is a fundamental principle in the implementation of*

*democratic and accountable governance. Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure mandates all public bodies to provide and manage information openly through a Public Information List. In the context of local government, the role of governmental communication units, particularly the Protocol and Leadership Communication Division, is crucial in ensuring public access to information. This study aims to analyze the role of the Protocol and Leadership Communication Division in supporting public information transparency in Lahat Regency. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies related to public information management through the Public Information and Documentation Officer (PPID) of Lahat Regency. The findings indicate that the Protocol and Leadership Communication Division plays a significant role in providing, packaging, and disseminating information on public policies and leadership activities, which are integrated into the digital-based Public Information List system. Nevertheless, the implementation of public information transparency has not been fully optimized due to several challenges, including limited coordination among local government agencies, constraints in human resource capacity, and low public utilization of available information. The study concludes that public information transparency is not solely determined by the existence of regulations and information systems, but also by the effectiveness of governmental communication practices and institutional commitment. Therefore, strengthening the role of the Protocol and Leadership Communication Division is essential to achieving sustainable and substantive public information transparency in Lahat Regency.*

**Keywords:** *Public Information Transparency; Leadership Communication; PPID; Local Government.*

## 1. PENDAHULUAN

Transparansi informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan publik, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintah. Dalam konteks pemerintahan daerah, transparansi informasi berperan strategis dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan legitimasi pemerintah, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Pratama et al., 2025).

Komitmen negara terhadap keterbukaan informasi publik secara normatif ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk

menyediakan, mengelola, dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Salah satu instrumen penting yang diamanatkan dalam regulasi tersebut adalah penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), yaitu catatan sistematis mengenai seluruh informasi yang berada di bawah penguasaan badan publik, baik yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, maupun yang tersedia setiap saat (Khumairoh & Setianto, 2023).

Dalam praktiknya, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan peran unit kerja yang menangani fungsi kehumasan dan komunikasi pimpinan. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki posisi strategis karena berperan sebagai penghubung utama antara pimpinan daerah dengan publik, khususnya dalam penyampaian kebijakan, program, dan aktivitas pemerintahan. Melalui fungsi komunikasi publik yang melekat, bagian ini berkontribusi langsung terhadap penyediaan informasi yang akurat, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat (Sangaji & Irianto, 2025).

Di Kabupaten Lahat, upaya mewujudkan transparansi informasi publik salah satunya diwujudkan melalui pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terintegrasi secara digital. Melalui aplikasi PPID Pemerintah Kabupaten Lahat, berbagai informasi publik dipublikasikan dan secara otomatis tersusun dalam Daftar Informasi Publik. Inisiatif ini menunjukkan adanya adaptasi pemerintah daerah terhadap tuntutan keterbukaan informasi di era digital, sekaligus sebagai bentuk implementasi regulasi keterbukaan informasi secara lebih efektif dan efisien.

Namun demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem dan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana informasi tersebut dikelola, dikomunikasikan, dan disampaikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menjadi krusial, terutama dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan mencerminkan prinsip transparansi, akurasi, dan kepentingan publik. Ketidaktepatan dalam pengelolaan komunikasi publik berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi, miskomunikasi, bahkan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Permadi & Sofyan, 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas transparansi informasi publik sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi organisasi pemerintah, kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen pimpinan daerah dalam mendorong keterbukaan (Guntur

et al., 2025). Oleh karena itu, kajian mengenai peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam mendukung transparansi informasi publik menjadi penting untuk memahami sejauh mana fungsi komunikasi dijalankan secara optimal dalam konteks pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terhadap transparansi informasi publik di Kabupaten Lahat. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana fungsi komunikasi pimpinan dijalankan, kontribusinya dalam penyediaan dan publikasi Daftar Informasi Publik melalui PPID, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan tata kelola komunikasi publik di tingkat pemerintahan daerah

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam mendukung transparansi informasi publik di Kabupaten Lahat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan perspektif aktor dan konteks yang diteliti (Novalia, 2025). Data penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik, observasi terhadap praktik penyediaan informasi melalui aplikasi PPID Kabupaten Lahat, serta studi dokumentasi terhadap Daftar Informasi Publik dan regulasi terkait keterbukaan informasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang valid dan kredibel mengenai peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam mewujudkan transparansi informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses pengumpulan data kualitatif yang meliputi wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi terhadap pengelolaan

informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. Fokus utama penelitian diarahkan pada peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam mendukung transparansi informasi publik, khususnya melalui penyediaan dan pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) yang terintegrasi dalam sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lahat.

## **1. Peran Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam Pengelolaan Informasi Publik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat. Bagian ini tidak hanya bertugas mengelola kegiatan keprotokolan pimpinan daerah, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyusun, mengemas, dan menyampaikan informasi kebijakan serta aktivitas pemerintahan kepada publik. Peran tersebut selaras dengan fungsi komunikasi publik pemerintah yang menekankan pada penyediaan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses (Jannah & Mulyasih, 2025). Dalam praktiknya, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berfungsi sebagai penghubung antara pimpinan daerah dengan PPID, khususnya dalam penyediaan konten informasi yang berkaitan dengan kebijakan strategis, agenda pimpinan, serta program pembangunan daerah. Informasi tersebut kemudian diklasifikasikan dan dipublikasikan melalui sistem PPID untuk selanjutnya tercatat dalam Daftar Informasi Publik. Hal ini menunjukkan bahwa bagian ini berkontribusi langsung dalam mendukung mekanisme keterbukaan informasi publik secara kelembagaan.

## **2. Implementasi Daftar Informasi Publik (DIP) di Kabupaten Lahat**

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat telah mengimplementasikan penyusunan Daftar Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Melalui aplikasi PPID Kabupaten Lahat, informasi publik yang dikuasai oleh badan publik disusun secara sistematis dan dapat diakses oleh masyarakat. DIP tersebut mencakup informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi serta-merta, serta informasi yang tersedia setiap saat. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berperan dalam memastikan bahwa informasi terkait pimpinan daerah, kegiatan pemerintahan, serta kebijakan strategis disampaikan kepada PPID secara tepat waktu. Informasi ini kemudian diproses dan dipublikasikan secara digital, sehingga

memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Digitalisasi DIP ini sejalan dengan prinsip transparansi dan efisiensi dalam pelayanan informasi publik di era pemerintahan berbasis elektronik (Ahmad & Santoso, 2025). Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum seluruh informasi yang relevan tersaji secara lengkap dan diperbarui secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah serta perbedaan pemahaman mengenai klasifikasi informasi publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi DIP tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kualitas komunikasi dan koordinasi internal antar unit kerja.

### **3. Transparansi Informasi Publik sebagai Praktik Komunikasi Pemerintahan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, transparansi informasi publik di Kabupaten Lahat dipahami sebagai bagian dari praktik komunikasi pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berupaya menyampaikan informasi yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga substantif, khususnya terkait kebijakan dan program pemerintah daerah. Informasi yang disampaikan melalui kanal resmi, termasuk website PPID, media sosial pemerintah, dan rilis berita, berfungsi sebagai sarana edukasi publik sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Kapahang (2020) yang menegaskan bahwa komunikasi publik pemerintah harus mengedepankan keterbukaan, kejelasan pesan, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa tingkat pemanfaatan informasi publik oleh masyarakat masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi PPID serta rendahnya literasi informasi di kalangan masyarakat. Dengan demikian, transparansi informasi publik belum sepenuhnya diiringi dengan partisipasi publik yang optimal.

### **4. Tantangan dalam Pelaksanaan Transparansi Informasi Publik**

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam mendukung transparansi informasi publik. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang komunikasi publik dan pengelolaan informasi. Kondisi ini berdampak pada kualitas penyajian informasi serta kecepatan pembaruan data dalam sistem PPID. Kedua, masih

adanya kekhawatiran dari beberapa pihak terkait potensi penyalahgunaan informasi publik, sehingga menyebabkan kehati-hatian berlebihan dalam membuka informasi. Sikap ini berimplikasi pada lambatnya proses penyediaan informasi tertentu yang seharusnya dapat diakses oleh publik. Fenomena ini sejalan dengan temuan Dunggio et al. (2025) yang menyatakan bahwa budaya birokrasi yang tertutup masih menjadi tantangan utama dalam implementasi keterbukaan informasi di tingkat daerah. Ketiga, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sering kali bergantung pada kesiapan perangkat daerah lain dalam menyediakan data dan informasi, sehingga keterlambatan pada satu unit dapat memengaruhi keseluruhan proses transparansi informasi publik.

## **5. Dampak Peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terhadap Transparansi**

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi informasi publik di Kabupaten Lahat. Keberadaan sistem PPID yang terintegrasi dengan DIP memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara lebih mudah dan terstruktur. Selain itu, komunikasi yang dilakukan secara konsisten melalui berbagai kanal resmi turut meningkatkan visibilitas kinerja pemerintah daerah. Peran ini juga berkontribusi dalam membangun citra positif pemerintah daerah sebagai institusi yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* yang menempatkan transparansi sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan (Satria & Juliana, 2020).

## **B. Pembahasan**

Pembahasan ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap temuan penelitian mengenai peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam mewujudkan transparansi informasi publik di Kabupaten Lahat. Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan kerangka teoritis komunikasi pemerintahan, prinsip keterbukaan informasi publik, serta regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena empiris, tetapi juga menjelaskan makna dan implikasinya dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah.

## 1. Peran Komunikasi Pimpinan dalam Perspektif Teori Komunikasi Pemerintahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menjalankan fungsi strategis sebagai mediator komunikasi antara pimpinan daerah dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori komunikasi pemerintahan yang menempatkan komunikasi publik sebagai instrumen utama dalam penyampaian kebijakan, pembentukan opini publik, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Saleh et al., 2020). Dalam konteks ini, komunikasi pimpinan tidak sekadar bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan edukatif, khususnya dalam menjelaskan arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Keberadaan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai pengelola arus informasi dari pimpinan daerah menunjukkan bahwa transparansi informasi publik sangat bergantung pada kualitas komunikasi internal dan eksternal organisasi pemerintah. Informasi yang disampaikan secara terstruktur dan konsisten melalui PPID berfungsi sebagai sarana legitimasi kebijakan publik. Hal ini memperkuat pandangan bahwa komunikasi pemerintahan yang efektif merupakan prasyarat bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik (Chandra, 2024).

## 2. Transparansi Informasi Publik sebagai Implementasi Good Governance

Transparansi informasi publik merupakan salah satu prinsip utama *good governance* yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat telah berupaya mengimplementasikan prinsip tersebut melalui penyediaan Daftar Informasi Publik berbasis digital. Upaya ini sejalan dengan pandangan Zulkarnain & Zalia Maghfira (2022) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun demikian, pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan akses terhadap informasi, tetapi juga mencakup kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan pemahaman informasi oleh masyarakat. Dalam hal ini, peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menjadi penting dalam mengemas informasi kebijakan agar dapat dipahami oleh publik secara luas. Transparansi yang bersifat administratif tanpa disertai strategi komunikasi yang efektif berpotensi kehilangan makna substantifnya.

### 3. Digitalisasi PPID dan Dinamika Keterbukaan Informasi

Pemanfaatan aplikasi PPID oleh Pemerintah Kabupaten Lahat mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi informasi publik memberikan kemudahan akses, efisiensi, serta meningkatkan jangkauan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Temuan ini selaras dengan konsep *e-government* yang menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi pemerintahan (Agus Sugiyardi, 2019). Meskipun demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa digitalisasi PPID belum sepenuhnya diiringi dengan optimalisasi konten dan pembaruan informasi secara berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi hanya berfungsi sebagai alat, sedangkan keberhasilan transparansi informasi tetap bergantung pada komitmen organisasi dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berperan sebagai pengendali kualitas informasi yang dipublikasikan, sekaligus sebagai penghubung antar unit kerja dalam penyediaan data yang akurat dan relevan.

### 4. Tantangan Budaya Birokrasi dan Koordinasi Internal

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah masih adanya hambatan budaya birokrasi yang cenderung berhati-hati dalam membuka informasi publik. Pembahasan ini menguatkan temuan Guntur et al. (2025) yang menyebutkan bahwa resistensi terhadap keterbukaan informasi sering kali dipengaruhi oleh kekhawatiran akan konsekuensi hukum dan politik. Sikap ini berdampak pada lambatnya proses penyediaan informasi serta terbatasnya variasi informasi yang dipublikasikan. Dalam konteks ini, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menghadapi tantangan dalam membangun kesadaran bersama antar organisasi perangkat daerah mengenai pentingnya transparansi informasi. Koordinasi internal yang belum optimal menyebabkan ketergantungan pada kesiapan unit lain dalam menyediakan data. Oleh karena itu, transparansi informasi publik memerlukan pendekatan manajerial yang menekankan kolaborasi, standar operasional yang jelas, serta penguatan kapasitas aparatur.

### 5. Transparansi Informasi dan Partisipasi Publik

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik belum secara otomatis meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun informasi telah tersedia

melalui PPID, tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat masih relatif rendah. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori partisipasi publik yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh literasi informasi dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah (Maharani & Usiono, 2024). Dalam konteks ini, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi publik melalui komunikasi dua arah. Informasi yang disajikan perlu disertai dengan upaya sosialisasi, edukasi publik, serta penggunaan berbagai saluran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Dengan demikian, transparansi informasi publik dapat bertransformasi menjadi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan.

## 6. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, pembahasan ini memperkuat pandangan bahwa transparansi informasi publik merupakan hasil dari interaksi antara regulasi, sistem, dan praktik komunikasi pemerintahan. Peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tidak dapat dipisahkan dari konteks organisasi dan budaya birokrasi yang melingkupinya. Temuan ini memperkaya kajian komunikasi pemerintahan dengan menekankan pentingnya fungsi komunikasi pimpinan dalam mendukung keterbukaan informasi di tingkat daerah. Secara praktis, pembahasan ini memberikan implikasi bagi Pemerintah Kabupaten Lahat untuk memperkuat kapasitas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyusunan standar komunikasi publik, serta penguatan koordinasi dengan PPID dan organisasi perangkat daerah lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas transparansi informasi publik secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi informasi publik di Kabupaten Lahat, khususnya melalui fungsi komunikasi pemerintahan yang terintegrasi dengan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peran tersebut tercermin dalam penyediaan, pengemasan, dan penyampaian informasi kebijakan serta aktivitas pimpinan daerah yang selanjutnya tersusun dalam Daftar Informasi Publik secara sistematis dan berbasis digital.

Implementasi keterbukaan informasi publik telah menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip *good governance*, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan transparansi informasi publik belum sepenuhnya optimal, yang ditandai dengan keterbatasan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, perbedaan pemahaman mengenai klasifikasi informasi publik, serta masih rendahnya tingkat pemanfaatan informasi oleh masyarakat. Tantangan budaya birokrasi yang cenderung berhati-hati dalam membuka informasi dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia turut memengaruhi efektivitas komunikasi publik. Oleh karena itu, transparansi informasi publik tidak hanya memerlukan dukungan sistem dan regulasi, tetapi juga penguatan peran komunikasi pimpinan yang berorientasi pada kepentingan publik, kejelasan pesan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang substantif dan berkelanjutan di Kabupaten Lahat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sugiyardi. (2019). URGENSI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan). *PUBLIC CORNER*, 14(2), 83–96.
- Ahmad, I., & Santoso, P. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 1–10.
- Chandra, L. P. (2024). PENGARUH AKUNTABILITAS, EFEKTIFITAS KERJA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PUBLIK DIMODERASI TRANSPARANSI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(4), 1–23.
- Dunggio, R., Mahmud, S. I., & Sihira, S. S. (2025). Birokrasi Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3871–3879.
- Guntur, W. N., Tuan, Y., & Asnawi, N. (2025). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT BAGI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE

- PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI. *Petitum Law Journal*, 2(2), 483–504.
- Jannah, F., & Mulyasih, R. (2025). PENERAPAN 7CS PUBLIC RELATION DALAM STRATEGI INFORMASI DISKOMINFO TANGSEL MELALUI INSTAGRAM. *Jurnal Riset Komunikasi Terapan*, 03(01), 21–36.
- Kapahang, S. E. (2020). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMINFO PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1), 1–13.
- Khumairoh, U., & Setianto, W. A. (2023). Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Melalui Layanan Informasi Publik PPID Provinsi DKI Jakarta. *KOMUNIKASI: Jurnal Komunikasi*, 14(2), 169–180. <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i2.2023>
- Maharani, R. A., & Usiono. (2024). Peran Media Digital dalam Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Publik : Transformasi Komunikasi di Era Informasi dan Sosial. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Sains Student Research*, 2(6), 506–513.
- Novalia, S. (2025). Peran Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah di Kota Bukittinggi. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(5), 315–319.
- Permadi, R. Y., & Sofyan, N. (2025). PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN TATA KELOLA SURAT-MENYURAT DINAS DI DESA SINDULANG KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG. *Midang*, 3(3), 90–99.
- Pratama, H. E., Putri, R. A., Dsp, P., Alfian, M., & Poernomo, R. W. (2025). Relevansi Peran Strategis DPRD terhadap Prinsip Good Governance dalam Struktur Pemerintahan Daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 16295–16300.
- Saleh, M., Khair, A., Sarkawi, S., & Kafrawi, K. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat. *Jatiswara*, 35(3), 353–361. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i3.271>
- Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(1), 54–70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>

Satria, R. G., & Juliana, C. (2020). Strategi Dan Kinerja Perusahaan: Analisis Moderasi Good Corporate Governance. *Prosiding Working Papers Series In Management*, 12(2), 120–136. <https://doi.org/10.25170/wpm.v12i2.4515>

Zulkarnain, I., & Zalia Maghfira, A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(3), 63–79. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i3.13412>